

**Ber(Diper)mainkan di Tepi Batas**  
Murid, Drs. MA.

ABSTRAK

Pada mulanya marjinalitas Maluku Utara hadir dalam “peta kognisi” sebagian orang Indonesia. Dilihat sepintas ini tampak sepele sehingga diabaikan. Padahal tidak! Ia memiliki konsekuensi serius. Asumsinya, sesuatu yang termarginalkan dari pikiran maka sesuatu itu akan diabaikan. tulisan ini menyakut sejarah marginalitas daerah, dan bagaimana marginalitas yang telah mengancam integrasi nasional ditanggulangi. birokrasi pemerintah pusat merupakan tempat yang strategis dalam dua arti. Pertama, dengan menampung pegawai yang berasal dari suku bangsa yang berbeda, birokrasi pemerintah pusat sudah melakukan integrasi nasional. Kedua, ini berkaitan dengan apa yang disebut dengan ‘percakapan antarbudaya’ dalam proses perencanaan pembangunan.

**Keyword :Bermain ,dipermainkan**

**Pada Mulanya...**

“Mas/mbak dari mana”?

“Dari Ternate”!

“O... dari Flores, ya”?

“Bukan! Dari Maluku Utara”

“O... dari Manado, ya”?

“Bukan! Maluku Utara”.

“O... Ambon ya?”

Secara keseluruhan tulisan ini menyakut sejarah marginalitas daerah, dan bagaimana marginalitas yang telah mengancam integrasi nasional ditanggulangi. Tulisan ini memilih Maluku Utara sebagai kasus marjinalisasi yang di alami banyak daerah di Indonesia. Di Maluku Utara, marginalitas muncul dalam beragam bentuk dan dipicu banyak faktor pengaruh. Pola penyelenggaraan pendidikan, kebijakan politik pembangunan ekonomi negara dan bentuk negara, sejauh ini di yakini merupakan faktor pengaruh paling fundamental marjinalitas daerah. Artikel ini berusaha menjawab pertanyaan: Mengapa Maluku Utara tidak mengalami kemajuan sosial, budaya dan ekonomi secara signifikan dibandingkan daerah lain, padahal pada satu masa tertentu empat kerajaan di sana menjadi salah satu pusat perdagangan dunia?

Pada mulanya marjinalitas Maluku Utara hadir dalam “peta kognisi” sebagian orang Indonesia. Dilihat sepintas ini tampak sepele sehingga diabaikan. Padahal tidak! Ia memiliki konsekuensi serius. Asumsinya, sesuatu yang termarginalkan dari pikiran maka sesuatu itu akan diabaikan. Dialog di atas, saya kutip dari seorang mahasiswa asal Maluku Utara di Yogyakarta yang bercerita dengan perasaan jengkel, menggambarkan marjinalitas Maluku Utara dalam “peta kognisi” yang tidak hanya terjadi di kalangan mahasiswa, melainkan di alami banyak orang pintar, bahkan pejabat negara.

Mengapa mahasiswa asal Maluku Utara itu “jengkel” atau sekurangnya heran, ketika teman mahasiswa Jawa-nya tidak tahu letak geografi “Ternate”. Ada banyak musabab. Ketika menyebut Ternate sebagai daerah asal, mahasiswa itu berharap bilik otak teman Jawa-nya segera membuka memori tentang kerajaan di Indonesia. “Bukankah Ternate salah satu dari empat kerajaan besar di Maluku Utara yang pada abad ke-17; terutama di masa kekuasaan Sultan Babullah (1570-1583) wilayahnya menjangkau setengah dari wilayah Indonesia sekarang (Mansoben, 1980; Mansoben 1995; Hanna dan Alwi, 1993; Alwi, 3003;Amal,

2010; Widjojo, 2013). Padahal tidak! Memori geografi banyak orang Indonesia “tidak Indonesia lagi”.

Pendidikan formal punya jasa besar. Doktrin Wawasan Nusantara dalam kurikulum pendidikan Orde Baru tidak merangkul Indonesia seutuhnya. Hanya “Budi” dan “Ibu Budi” ada dalam Bahasa Indonesia di SD. “Daeng Naba”, “Buyung” dan “Bapak Buyung” terabaikan. Geografi malahan hanya mengajarkan nama ibukota negara-negara dan nama ibukota propinsi. Ilmu Kewiraan dan Pancasila juga penuh-sesak terma-terma dalam bahasa Jawa. Daerah lain? Terlalu samar untuk bisa dihafal.

Artinya, yang dilupakan mahasiswa asal Maluku Utara itu bahwa Orde Baru dan sebelumnya Orde Lama, telah mendesak daerah lain kepinggiran, dan setelah dipinggiran daerah direcoki oleh segala sesuatu yang datang dari luar dunia mereka. sementara itu, pada waktu bersamaan semua orang juga diajari dan tumbuh dalam kesukubangsaan sendiri dengan sejarah yang dibentuk dari cerita-cerita dan hidup dalam cerita-cerita yang dibuat sendiri, selanjutnya cerita-cerita seperti itu dijadikan sebagai panggung teater kehidupan sosial dan kultur di mana setiap orang dan suku-bangsa memerankan dirinya melalui imajinasi tentang masa lalu yang penting (Danning, dalam Clumming, 2015:5-7).

Jadi, ketika menyebut Ternate dan berharap teman-temannya tahu letak Ternate, bisa dibaca merupakan proses “penciptaan sejarah”<sup>1</sup>; dalam arti “mentransformasikan persepsi masa lalu ke masa kini sebagai gugus-gugus waktu berbeda namun saling menyerap melalui serangkaian abstraksi yang signifikansinya dapat dilihat dalam konteks sosial politik yang saling terjalin di dalamnya (Clumming, 2015:78, 91). Dengan kata lain, saat menyebut Ternate, mahasiswa itu barangkali sedang membayangkan semua orang Indonesia sama seperti dia yang tahu daerah lain, yang diperoleh dari palaran sekolah, dan dengan itu memungkin dia mampu membayangkan dirinya menjadi bagian dari orang lain di daerah yang jauh yang dia tidak/belum pernah bertemu tetapi sama-sama merasa menjadi anggota komunitas (Anderson2002; Dakidae, 2002).

Padahal apa yang bayangkan mahasiswa asal Maluku Utara itu barangkali terjadi hanya di akhir era kolonial akhir saat dimana setiap suku-bangsa yang berbeda yang tinggal di daerah berjauhan-jauhan dihubung-rekatkan oleh berita radio yang kemudian membentuk perasaan senasib lantas selanjutnya membentuk semangat nasionalisme Indonesia (Mr’azek, 2006). Semangat seperti itu nyaris pupus setelah kemerdekaan dan apalagi pada masa rezim Orde Baru. Sejak itu, daerah adalah pinggiran yang kurang penting bahkan diabaikan oleh mereka di pusat.

### **Marjinalisasi oleh Negara Bangsa**

“Margins as a space where power is exercised but where its implementations cannot be ensured. The interest is in margins of the state, but one might speak of margin of empire or of global margin: spaces where power is exercised but where it is not assured. Margins in this sense are everywhere rather than far away. Margins exists in three forms. The first kind of margins refer to marginal peoples or territorial that seem to be need of "pacification" -- a marginal peoples and territorial would be an example of this. The second form related to the symbolically productive obscurity of state power, its illegibility. marginality in the sense is about the productive uncertainty of power of it is exercised. Example in this kind of margin it is circulation of letters that people do not understand but still attributed to the state, making the state present through its partial legibility. The third sense focused on the margin as a "spaces between bodies, law, and

---

<sup>1</sup>Frasa “menciptakan sejarah” sebagai proses tafsir terhadap dua atau lebih masalah yang berbeda jika dilihat hanya sebentar, tetapi sesungguhnya hal-hal yang berbeda-beda itu memiliki hubungan kemaknaan (*signification*) antara satu dengan yang lainnya. Karya John Pamberton (2003) “Jawa” adalah salah satu dari banyak karya “penciptaan sejarah Indonesia”. Dalam karya itu, Pamberton melihat hubungan antara ritual dan masa lalu digunakan Indonesia Orde Baru untuk mengekalkan dan pemujaan terhadap stabilitas.

discipline". This kinds of margins designates the interstices between state power (whether sovereign power or disciplinary power) and bodies – the functions and disfunction of bio-power” (Bubandt, 2014:85-86).

Pinggiran dalam kutipan di atas pertama dan terutama merujuk pada makna *ruang* (tempat yang diberi konteks) yang di situ kekuasaan kerajaan, belakangan negara-bangsa, diimplementasikan dengan tidak pasti. Negara berkepentingan terhadap pinggiran seperti itu, yang “hadir di mana-mana” dan “tidak jauh-jauh”, dengan setidaknya muncul dalam tiga jenis rupa.

Pertama, masyarakat atau teritorial yang (ter)dipinggir(kan) yang tampaknya membutuhkan pasifikasi. Ada kesalahpahaman muncul dalam tafsir pinggiran jenis ini, yakni masyarakat pinggiran adalah seperti komunitas tempatan Togutil di Halmahera Utara dan Kadai di Sula. Mempertimbangkan frasa “pasifikasi”, seluruh masyarakat dan wilayah yang dipasifikasi masuk sebenarnya menjadi pinggiran. Artinya, ketika kedaulatan negara dirangkum dalam “kesatuan teritorial” dan di situ satu garis politik ditarik kejang menandai “pusat” dan “daerah”, semua kelompok masyarakat dan daerah di luar pusat, bahkan permukiman kumuh di sisi metropolitan di pusat, adalah pinggiran.

Kedua, ini terkait dengan frasa “pasifikasi” yang muncul dalam sebetuk ketidakjelasan simbolis yang diproduksi negara yang seringkali (sebenarnya selalu) tidak terbaca. Di Maluku Utara hal itu muncul dalam sikap politik Indonesia terhadap pilihan Sultan Iskandar Muhammad Djabir Sjah yang mendukung Republik Indonesia Serikat (RIS), lalu memilih menjadi bagian Nagara Indonesia Timur (NIT) (Djafaar, 1999). Selama kerja palangan untuk penulisan disertasi, berulang kali saya dengar: “Dilihat dari sisi sejarah Maluku Utara layak menjadi propinsi. Pemerintah pusat melalui Soekarno menginginkan itu juga. Tetapi sikap politik Sultan Iskandar yang berbeda dengan kebijakan pusat, maka Maluku Utara kemudian ter(di)singkir dari peta politik negara”. Artinya, Indonesia yang segera setelah kemerdekaannya diumumkan langsung berhadapan dengan pilihan bentuk-sistem negara “federal” atau “kesatuan” (banyak sejarawan menganggapnya merupakan biang kerok Indonesia nyaris terdisintegrasi, dan menjadi sejarah kalam Indonesia) merasa memiliki cukup alasan untuk mempasifikasi Maluku Utara berada di tepi batas negara (bandingkan, van Klinken, 2007:182). Jika itu soalnya, Sultan Iskandar tidak sendiri. Tokoh dari daerah lain, termasuk Muhammad Hatta dan kalangan sosialis-religius juga mendorong negara federal (Legge, 1993; Bertrand, 1912).

Ketiga, agar pemahan kita menjadi sedikit bulat tentang marjinalitas daerah yang diselenggarakan Indonesia dalam serangkaian pasifikasi, kita mesti melangkah ke konsep “ruang antar tubuh, hukum, dan disiplin”, atau “celah antara kekuasaan negara (kekuasaan yang berdaulat atau kekuasaan pendisiplinan) tentang fungsi dan disfungsi dari reproduksi kekuasaan, “bio-power” (baca, Foucault, 2002; Foucault, 2009).

Di sini, peminggiran dan penundukan pinggiran harus dilihat dalam kerangka produksi dan reproduksi wacana yang tidak sekadar menyangkut cara berpikir, mengetahui, dan mengatakan obyek yang sudah diketahui sebelumnya, melainkan juga sebagai praktek yang digunakan secara sistimatis oleh otoritas negara untuk memberi makna dan tujuan pada obyek yang dibicarakan dalam satu jalinan antara pikiran, bahasa, pengetahuan dan tindakan yang muncul dalam praktek “kepengaturan” (*governmentalities*), yang menicayakan pengakuan atas pentingnya rasionalitas khusus dalam membangun logika kekuasaan pemerintah yang berkerja dalam situasi apa pun” (Foucault dalam Jones 2015:21). Produk hukum negara yang membatasi ruang ekspresi keberagaman budaya, serta doktrin “kita berbeda-beda tetapi satu” yang tampak ilmiah, adalah contoh baik dalam kasus ini.

Saya tidak tahu persis apakah marginalitas seperti ini yang dirasakan elit modern saat membincangkah “Indonesia menganaktirikan Maluku Utara”. Saya juga belum mengerti

apakah karena alasan itu sehingga mereka yang dulu menolak gagasan Sultan Mudaffar Sjah agar Maluku Utara ditetapkan menjadi Daerah Istimewa dengan nama Propinsi *Moloku Kie Raha*, sekarang dengan “malu-malu” dan “sembunyi-sembunyi” mendukung Sultan Tidore yang menuntut Maluku Utara ditetapkan menjadi daerah dengan status Otonomi Khusus.

Pastinya, diskursus pendisiplinan/pasifikasi yang diselenggarakan Indonesia melalui serangkaian produk hukum nyaris sempurna menempatkan orang-orang Maluku Utara, juga daerah lain – setidaknya selama masa Indonesia Orde Baru, dan sekarang masih terjadi – pada apa yang disebut Edward Ralp (via Ritzer, 2006:51) “tempat yang bukan tempat”, dalam arti “sebuah lingkungan tanpa tempat signifikan dan sikap tidak mengakui arti, dengan cara memotong akar, pengikisan simbol-simbol, dan penggantian keanekaragaman dengan keseragaman (lihat, Nurgroho, 2006). Penempatan seperti ini selalu menyakitkan. Dan agar pasifikasi peminggiran terasa memuaskan, tidak menyakitkan, negara-korporasi perlu menciptakan “tempat yang bukan tempat” itu menjadi “tempat-tempat” yang seolah-olah dipenuhi dengan arti, obyek yang nyata, sumber-sumber penting bagi identitas individu dan komunal, pusat besar dari eksistensi manusia terhadap mana orang memiliki ikatan emosional dan psikologis”.

Percakapan santai dengan seorang teman berikut adalah contoh pasifikasi dengan cara memberi “tempat yang bukan tempat” pada orang di daerah.

“Ada yang aneh dalam cara pemerintah pusat menetapkan standar mutu penerimaan CPNS. Bagaimana mungkin anak-anak Maluku Utara disuruh bersaing dengan anak-anak Jawa yang dari sisi mana pun dilihat lebih berkualitas karena mereka jebolan perguruan tinggi berkualitas. *Okay*, mereka (pemerintah pusat, *pen.*) boleh mengatakan ini era kompetisi. Lagi pula Indonesia sudah terikat perjanjian-perjanjian ketenagakerajaan yang bersifat mondial. Tetapi harus diingat, kalau kita menggunakan ‘tangga evolusi’, dari satu sampai sepuluh, pendidikan di pulau Jawa sudah mencapai tangga kedelapan atau kesembilan; sementara pendidikan kita baru di tangga ketiga atau keempat. Keterlambatan pendidikan kita punya sejarah panjang. Sejak Belanda membangun Batavia, penjajah itu hanya membangun pendidikan di Jawa. Daerah lain tidak dihiraukan. Sudah begitu, ketika dana IGGI digelontorkan untuk beasiswa, yang banyak menikmati adalah dosen-dosen di Jawa. Dan kita, ampasnya tidak kebagian. Kualitas pendidikan di Jawa seperti sekarang, salah satunya adalah hasil beasiswa dari IGGI itu. Lalu mengapa kita disamakan, padahal kita berbeda? Pemerintah pusat tidak bisa mengatakan kita mngabaikan pendidikan selama era otonomi daerah.

Standar kualitas penerimaan CPNS seperti itu merupakan salah satu “tempat yang bukan tempat” yang dibuat Indonesia bagi daerah dengan cara menarik “garis depan” (*frontire*) antara Indonesia dengan beragam suku-bangsa di dalamnya. Di situ, di tepi batas itu, orang daerah ditempatkan dan diminta “bermainan” tatapi hanya “seakan-akan bermain” dalam Indonesia. Anna Lauwehaupt Tsing menyebut “garis depan” ini dengan “friksi”:

“Fragmen-fragmen ketika orang Indonesia memanfaatkan peluang (bersiasat) di garis depan (‘ruang hampa makna’) perjumpaan globalisasi dengan sumber-sumber alam dan sumberdaya manusia. Di sana dapat ditemukan kualitas-kualitas interkoneksi yang aneh, tidak sepadan, tidak stabil, dan kreatif. Dalam friksi itulah secara terus menerus identitas dan kebudayaan lokal dan budaya apa saja direproduksi menjadi sesuatu yang sulit sekali diduga ujung pangkalnya” (via Laksono, 2009:10).

Kutipan di atas mengingatkan saya pada dongeng tentang cengkih yang berulang kali disampaikan informan masyarakat adat selama kerja lapangan; dongeng tentang sejarah

panjang masyarakat Maluku Utara yang merasa tersingkirkan. Dongeng itu mengatakan begini:

“Daerah ini sudah terkenal di seluruh dunia sebelum orang Eropa datang ke sini.. Orang Arab telah menggunakan cengkik jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Mereka juga yang memperkenalkan cengkik kepada bangsa Eropa. Tetapi, saat orang Eropa bertanya: Dari mana cengkik itu didapat, orang Arab berbohong – cengkik berasal dari sarang burung. Dari mana burung menemukannya kami tidak tahu”.

Dongeng ini bersangkut paut dengan “dunia lama” kita dan “dunia baru” yang diangkut globalisasi kapital yang ditandai oleh peningkatan arus perdagangan, keuangan, kebudayaan, gagasan, teknologi canggih di bidang komunikasi, perjalanan dan persebaran kapitalisme neoliberal ke seluruh penjuru dunia (Castells, 2000; Halpern, 2005; Lewellen, via Laksono, 2009:10). Bersama dengan itu, hal-hal bersifat lokal dan regional di adaptasikan, mungkin juga diperlawanankan, dengan arus-arus itu, yang selanjutnya kebiasaan-kebiasaan, organisasi kehidupan sosial, dan kesadaran global (Ritzer, 2006:96; Laksono, 2009:1) tumbuh dalam sebetuk eskalasi perilaku “konsumtif” di level lokal dan regional yang, dengan satu dan lain cara, bisa dibaca merupakan petunjuk varian penindasan kemanusiaan dalam bungkus negara yang mengejar pertumbuhan sekaligus memunculkan kesadaran semu masyarakat sehingga penindasan seperti itu terasa memuaskan (Nugroho, 2006:xxiv).

Itu juga yang menjadi kesadaran tersamar informan saya saat mendiskusikan marjinalitas Maluku Utara. Karena proses glonalisasi selalu menumpang otoritas negara – negara berfungsi mendukung kepentingan modal nasional maupun multinasional – maka dalam mendiskusikan marjinalitas Maluku Utara mesti pula mempertimbangkan peran negara kolonial sebagai akar, atau merupakan awal gelombang pertama globalisasi ekonomi dunia kini. Ini penting karena negara-negara paska kolonial, dalam batas-batas tertentu, masih meneruskan semangat kolonialisme yang, bersama-sama dunia usaha yang dipihaknya, menciptakan apa yang disebut pinggiran yang diterlantarkan sebagai salah satu tempat yang bukan tempat itu.

Dalam konteks sejarah ekonomi Maluku Utara paling awal, dan hingga kini, “tempat bukan tempat”, atau “friksi” bisa dilacak dalam dongeng burung yang mengambil cengkik untuk membuat sarang, dan orang Arab menjadikannya bahan membohongi orang Eropa. Dongeng itu juga “tentang orang Eropa yang datang berebut cengkik sambil menyebarkan peperangan di antara para raja” (Pattimasang, 2013 2-3), lalu negara dan korposarinya membawa cengkik pada saat itu, dan emas sekarang, ke suatu “tempat” yang bagi orang Maluku Utara adalah “bukan tempat” bagi mereka. Singkatnya, bersama-sama korporasi, negara kolonial dan Indonesia adalah burung-burung yang membawa sumberdaya alam untuk kenyamanan orang berada entah di mana sambil meninggalkan Maluku Utara terlantar dengan kemiskinannya di pinggiran.

Selain itu, dongeng ini juga merupakan narasai proses penciptaan rantai “pusat-pinggiran” yang berlapis-lapis<sup>2</sup> dan kesenjangan ekonomi. Orang Maluku Utara tidak mengenal “pusat-pinggiran” dan “kesenjangan ekonomi” sebelum orang Eropa datang. Pusat-pinggiran dan kesenjangan ekonomi pusat-pinggiran terjadi setelah kolonial Portugis dan Spanyol mengajari cara berbisnis cengki kepada kraton. Sebelumnya, petani memangkas ranting cengkik lalu menyerahkan atau dijual dengan harga murah ke kraton. Portugis dan Spanyol tahu yang mahal hanya buah cengkik, maka kepada kraton dipertintahkan untuk memerintahkan petani hanya memetik buah cengkik dan dijual ke kraton dengan harga murah. Setelah di jemur-kering, kraton menjual kepada pedagang dengan harga mahal. Sejak

---

<sup>2</sup>Contoh. Loloda pinggiran Halut; Halut Pinggiran Maluku Utara; Maluku Utara pinggiran Indonesia Timur; Indonesia Timur Pinggiran Indonesia-Jawa; Indonesia pinggiran Asia Tenggara; Asia Tenggara Pinggiran Asia.

itu kesenjangan ekonomi terjadi sekaligus menciptakan kraton menjadi “pusat” dengan rakyatnya yang miskin di “pinggiran” (Andaya, 1993:1-21; 2015:51-56)..

Indonesia lahir dari rahim kebangkrutan kolonialisme (globalisasi) dengan “pusat-pinggiran” yang telah tercipta sebelumnya lantas seakan terjebak lalu sekadar bermain-main dalam jaring-jaring globalisasi tahap selanjutnya. Pada posisi terjepit itu, seperti kerajaan dan negara kolonial dulu, Indonesia kemudian menempatkan daerah di tepi-batas sebagai “korban tombak bermata trisula yang ditusukan oleh duel modal dan kekuasaan politik” (Laksono, 2004:3). Pada posisi “korban” itu, orang Maluku Utara sekarang berusaha mengembangkan kesadaran dimarjinalkan Indonesia. Padahal, marjinalitas daerah telah terjadi sangat kuat sejak Belanda menerapkan “politik etis”<sup>3</sup>. Bercerita dalam konteks Indonesia Orde Baru, Daniel Dhakidae (2003:58) menulis:

“Politik etis adalah suatu kompetisi antara menjadi ‘*inlander*’ dan ‘*Neder-landen*’ dalam suatu binarium medan kolonial, yang boleh dikatakan hampir terbagi dua antara *boemi-poetra* dan kaum *Olanda*. Orde Baru adalah suatu kompetisi dalam medan binarium yang hampir sama di mana dibagi dua antara mereka yang berada di ‘dalam sistem’ dan mereka yang berada di ‘luar sistem’. Mereka yang berada di dalam sistem adalah para pegawai negeri, militer, partai-partai yang diresmikan Orde Baru, universitas negeri. Yang berada di luar sistem adalah rakyat jelata, kaum pinggiran, kaum seniman, para sarjana, aktivis lembaga-lembaga non-pemerintah”.

Marjinalisasi “tebang pilih” yang dilakukan negara kolonial dan Indonesia melalui serangkaian definisi kategorial orang, kelompok, dan daerah yang layak dan tidak layak masuk ke “bagian dalam”, dengan satu dan lain cara telah ditiru komunitas adat tempatan paska Orde Baru. Seperti produk hukum modern dalam negara kolonial dan Indonesia, adat bagi masyarakat adat dan masyarakat kesultanan adalah instrumen mengembangkan definisi “kita” untuk ditarik naik ke atas, dan “mereka” yang berada di luar panggung permainan politik/politisasi adat. Gerald Siden menulis:

“Adat melakukan banyak hal – ia bukanlah formulasi abstrak dari makna, atau pencarian untuk makna, meskipun adat mungkin menghantarkan makna. Adat jelas berhubungan dengan, dan berakar pada, realitas sosial serta material dari kehidupan dan kerja, meskipun itu semua tidak semata berasal dari realitas-realitas tersebut. Adat dapat memberikan suatu konteks tempat orang bisa melakukan hal-hal yang sulit untuk dilakukan secara langsung ... mereka dapat mewedahi untuk aksi-aksi kolektif, penyesuaian kolektif terhadap kepentingan-kepentingan, dan ekspresi kolektif dari perasaan-perasaan dan emosi dalam arena dan panggung para pemeran yang ikut serta dalam sebuah adat, menarik garis batas yang menempatkan orang lain berada di luarnya” (D’Andrea, 2013:165).

### **Marginalitas Geografis**

Selain marginalisasi yang dilakukan negara kolonial dan Indonesia, marginalisasi Maluku Utara mungkin juga bersangkut paut secara tidak langsung dengan perkara geografi perdagangan dunia yang tercipta sejak abad SM. Memang tidak ada data yang menjelaskannya secara langsung. Apalagi data sejarah tertulis kelompok masyarakat dan empat kerajaan di Maluku Utara sebelum abad ke-16<sup>4</sup> juga tidak tersedia. Sudah begitu,

---

<sup>3</sup>Bahkan saat Belanda membangun Batavia sebagai pusat perdagangan dan pusat kekuasaan politik mengendalikan di Asia Tenggara dan Hindia Timur, daerah-daerah di Jawa yang sebelumnya memiliki kemandirian ekonomi yang relatif, mengalami kemunduran drastis (Rottger-Rossler and Stodulka, 2014:11-29).

<sup>4</sup>Data tertulis tentang daerah ini baru ada pada abad ke-17 dan ke-19 dalam bentuk hikayat (Leirissa, 1969; de Clereq, 1999), seperti Hikayat Hitu (Rijali, dalam Staver, van Frassen, dan van der Putten, 2004) dan Hikayat Ternate (Naidah, dalam van der Grap, 1878). Di sisinya, karya paing awal yang orang Portugis, yang

karya orang Eropa paling awal lebih banyak mendeskripsikan “pertempuran antarbangsa Eropa dan intrik politik-ekonomi antara empat kerajaan dan antara empat kerajaan dengan sahabat molonial mereka (Hanna dan Alwil, 1989; Mann, 2004; Topatimasang, et.al. 2004; Alwi, 2005; Topatimasang, 2013). Karenanya, sulit bagi kita mengetahui bentuk rupa keadaan ekonomi Maluku Utara sebelum abad ke-16.

Diperhadapkan pada ketiadaan data seperti itu; tetapi orang Maluku Utara, setidaknya di Ternate dan Tidore yang saya temui, menceritakan sejarah mereka dalam kaitannya dengan “orang Arab yang telah menggunakan cengkih sejak awal abad ke-17 SM”, dan mendengarkan sejarah seperti itu akan bisa menimbulkan keasyikan tersendiri. Dan, di tengah keasyikan bercerita sejarah seperti itu kemudian mengajukan pertanyaan – “Jika cengkih telah digunakan suku bangsa sekitar Sungai Efrat sebelum tahun 1721 SM (Burnet, 2011:18), mengapa tanah asal cengkih tidak diketahui”? Atau “Ketika kompas, peta dan besi belum ditemukan, bagaimana membayangkan cengkih berpindah dan siapa yang membawanya dari Maluku ke gurun pasir kering di Suriah? (Turner, 2011: xix-xx) – para pencerita akan “gelagapan”. Seperti jawaban Turner, para pencerita itu mungkin mengatakan: “Hanya Tuhan yang tahu”.

Ya! “Hanya Tuhan yang tahu”. Soalnya bukan kemalasan intelektual atau ekspresi rendah hati ilmuwan yang menyadari diri berada di ujung lorong pencarian jawaban yang nyaris sia-sia. “Hanya Tuhan yang tahu” adalah jawaban tentang misteri tanah asal cengkih, setidaknya bagi orang Eropa, yang tahu tanah asal lada (*piper nigrum*) dari Pantai Malabar-India, yang mereka temukan dijual bersama-sama cengkih di pasar-pasar Mesir dan Persia sejak abad ke-11-8 SM (Wood, 2002), tetapi tempat asal cengkih mereka tidak tahu. Jadi kisah dari para pencerita sejarah di Ternate dan Tidore sebaiknya dibaca merupakan proses “pembayangan diri” dalam sejarah yang tanpa ujung pangkal-ujung waktu yang bisa diidentifikasi; bayangan tentang kebersamaan dalam bangunan bayang-bayang citra sebagai komunitas yang diproyeksikan dalam dimensi waktu dan ruang (Dakidae, 2000:xxxii-xxxiii). Di situ, sejarah adalah gagasan tentang waktu yang homogen dan hampa di mana keserempakan koordinasi yang menyeberangi arus waktu itu tidak ditandai oleh ramalan dan pemenuhannya melainkan oleh kebetulan temporalnya (Anderson, 2000:34-36). Cara pembayangan diri dalam satu rangkaian sejarah seperti itu, memungkinkan orang mengabaikan hal penting lain yang secara fundamental membentuk dinamika sosial, budaya, politik dan ekonomi yang terjadi di Maluku Utara. Faktor penting yang dilupakan itu adalah letak geografis.

Terletak di antara Samudra Pasifik di Utara, Laut Halmahera di Timur, Laut Maluku di Barat, dan Laut Seram di selatan; dan terhampar antar Sulawesi di Barat dan Papua di Timur, serta terbentuk dari relief besar palung oseanis, Maluku Utara merupakan bagian dari kepulauan yang lebih besar yang merentang dari Filipin, Sulawesi, dan Papua bagian utara, serta kontinen Melanesia (Andili, 1980:4-5). Angin *muson* [dari kata *mawsim*, bahasa Arab, berarti “musim” (Burner, 2011:24)] Barat Laut dan Timur Laut berlangsung September-Mei, musim Timur antara Juni-September yang bertiup secara teratur: Seraya mengikuti arus laut, orang Maluku Utara mestinya diuntungkan dengan kondisi geografi dan iklim seperti itu, sehingga mereka bisa menjadi pelaku aktif di jalur perniagaan dari Barat ke Timur Nusantara (Abdullah, 2010).

Tetapi, karena letaknya dekat dengan pulau Sulawesi dimana gunung-gunungnya menghalangi tiupan angin dari Barat ke Timur; dan dekat dengan garis katulistiwa yang – ketika matahari “bergeser” dari Utara ke Selatan, atau sebaliknya – membentuk apa yang

---

tiba di Ternate tahun 1512 dan Spanyol tiba di Tidore tahun 1521 (Amal, 2010:68,161) hanya yang menyebutkan Ternate, Tidore, Bacan, Makian sebagai pulau tempat tumbuh cengkih yang diperintah oleh seorang raja. Jailolo disebut tempat pohon cengkih hutan/liar tumbuh, dengan dua raja – Raja Kafir lebih kaya dari Raja Islam (Pires, via Cortesao, 2015:294-307; Pigaffeta, dalam Bausani, 1972).

disebut *intertropical front*, yang menimbulkan musim pancaroba dengan arah tiup tidak tetap, bahkan membuat *angin mati*, orang Maluku Utara hanya bisa menjadi pelayar-pelayar yang “melompat-lompat” dari satu pulau ke pulau lain (Leirissa, 1990:31-32) di sekitar terdekat. Itu mengapa pulau penghasil cengkih ini tidak terhubung dengan, dan baru muncul sayup-sayup di jalur-jalur perdagangan Nusantara, dan nyaring di kenal dunia setelah orang Eropa datang di awal abad ke-16<sup>5</sup>.

Meletakkan berderet peta perdagangan Jalur Sutra, Peta Perdagangan Nusantara, Peta Perdagangan Nusantara Timur, dan di atas peta itu ditarik garis-garis tegas yang menggambarkan jalur perdagangan, dan di situ posisi Maluku Utara dicari, Maluku Utara akan ditemukan berada di tepi batas perdagangan dunia. Jadi, masuk akal Maluku Utara sejak awal tidak menjadi pemain aktif perdagangan. Makassar yang baru terhubung dengan perdagangan Asia Tenggara di abad ke-16, kemudian menjadi sangat dominan dalam perdagangan di Nusantara Timur pada abad-abad selanjutnya, adalah contoh perbandingan yang baik peran penting letak geografi satu suatu bangsa terhubung dengan suku bangsa lain di tempat-pulau yang berbeda.

Tidak ada data pasti kapan Makassar menjadi bagian perdagangan di Asia Tenggara. Hingga abad ke-15, Makassar belum disebutkan dalam zona-zona perdagangan utama di Asia yang mencakup (a) zona Teluk Bengal – Karomandel-India Selatan, Sri Lanka, Birma-Myanmar, Pesisir Utara Sumatra; (b) zona Selat Malaka – meliputi semenanjung Malaka, Thailand, Vitnam Selatan atau Laut Cina Selatan; (c) zona Laut Sulu -- meliputi Luat Luzon, Mindaro, Cebu, Mindanao dan pesisir Utara Kalimantan-Brunai Darussalam; (d) zona Laut Jawa menjangkau Nusa Tenggara, Maluku, pesisir barat Kalimantan, Jawa dan selatan Sumatra (Poelinggomang, 2016:1-3).

Makassar yang masuk dalam jaringan perdagangan dengan titik waktu abad ke-16, atau akhir abad ke-15, oleh para sejarawan dikaitkan dengan perdagangan yang dimainkan Kerajaan Gowa (Cummings:2015:30-49). Di situ, kemajuan Makassar dikaitkan dengan kebijakan Karaeng Tumaparissi Kolanna (1510-1546) yang memindahkan Ibukota dari Tamalatea, Sungguminsa sekarang, ke Sumbaopu, muara Sungai Jeneberang, yang diikuti politik pasar bebas setelah menundukan/gabungkan Kerajaan Tallo yang telah memiliki hubungan ekonomi dengan Maros, Selayar, Malaka, dan Banda. Kenijakan ini dilanjutkan penerusnya, Karaeng Tunipangga Ulaweng (1546-1565), yang mengizinkan pedagang Jawa dan Melayu – Pahang, Patani, Campa, Minangkabau dan Johor (Poelinggomang, 2016:19-23). Faktor kebijakan ekonomi ini disebut-sebut merupakan faktor paling penting Makassar berkembang cepat sebagai pusat perdagangan. Jika hanya itu, Ternate juga sudah melakukannya. Tetapi mengapa Ternate dan Maluku Utara tidak semaju Makassar?.

Letak geografi adalah faktor paling menentukan Makassar menjadi kota perdagangan yang muncul di zaman modern. Hanya dengan melihat peta Indonesia segera bisa membenarkan proposisi ini. Berada dekat Pulau Jawa di sebelah Barat Daya; Kalimantan di Barat, Sunda Kecil dan Nusa Tenggara di Selatan, yang bersambung dengan gugusan kepulauan Wetar, Banda, Buru, Ambon, dan Seram di sebelah Tenggara, telah memungkinkan Makassar terjalin dalam perdagangan di kawasan yang luas itu. Dengan posisi geografis seperti itu, perdagangan Makassar bisa mencapai hingga Pilipin – setelah melompat ke pantai selatan Kalimantan, terus menelusuri pesisir utara pulau itu kemudian menyeberang ke kepulauan Sulu, lalu ke Mindanao.

Jarak antarpulau dan pengetahuan kosmografi sangat menentukan intensitas hubungan antar suku bangsa di pulau yang berlainan. Dan Makassar diuntungkan oleh “kedekatan-jarak” pulau-pulau yang menjadi kawasan perdagangan. Kedekatan-jarak antarpulau itu pula

---

<sup>5</sup>Pelayaran “melompat-lompat” adalah fenomena umum pada saat itu. Catatan perjalanan Pigafetta (dalam Bausani, 1972) adalah kisah paling baik tentang ini.

mengapa pada tahap selanjutnya pedagang Jawa lebih terhubung dengan zona Teluk Bengal; Karomandel-India Selatan, Sri Lanka, Birma-Mianmar, Pesisir Utara Sumatra; sementara Makassar mencapai wilayah ini baru pada abad ke-17. Pada waktu yang sama, orang Makassar juga berlayar ke Darwin melalui Wetar.

“Apabila kapal-kapal Belanda sampai ke pantai barat Australia secara kebetulan... kapal-kapal Bugis-Makassar ke pantai utara benua itu... mencari teripang yang sangat laku dalam perdagangan dengan orang Thionghoa. Pelayaran penangkapan teripang ke tanah Marege (nama penduduk Australia dalam bahasa Makassar dan Bugis) mengambil rute... Ujungpandang, Selayar, Wetar, Leti, Moa, selanjutnya ke selatan ke pelabuhan Darwin ... Pada waktu itu pelayaran Makassar hampir meliputi seluruh perairan Nusantara ... Aceh, Keda, Kamboja... ke timur Kei, Ternate, kepulauan Kalimantan Utara, Kepulauan Sulu... Selat Makassarlah yang dipakai untuk berlayar ke Manila. Melalui selat ini pula kapal-kapal Makassar dan Bugis mengunjungi Sulawesi Utara” (Lapian, 2008:46-48).

Faktor geografi dan jarak itu pula barangkali menjadi salah satu alasan *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC), yang berpusat di Benteng Oranje tahun (1615-1620) dipindahkan ke Batavia tahun 1620 (Alwi, 2005:335; Amal, 2010: 263), sebelumnya ke Ambon. Ada alasan bagi Jan Pieterzoon Coen, Gubernur Jendral VOC ke-4 memindahkan ibu kota dari Ambon ke Batavia. VOC memerlukan pusat yang lebih strategis agar bisa efektif kontrol wilayah kekuasaan perusahaan yang menjangkau wilayah dari Ternate di Timur hingga Sri Langka barat. Batavia persis di tengah-tengah wilayah-wilayah itu. Sementara terlalu jauh dengan Hindia Timur Bagian barat dan apalagi Sri Langka. Sejak itu Maluku Utara berada di paling Pinggir Hindia Timur.

### **Penutup**

Alih-alih menyimpulkan. Ini adalah bentangan “problem hipotesis” lain tentang marjinalitas wilayah dan kelompok sosial. Seperti telah diperlihatkan, selain faktor geografis yang mustahil di sangkal, marjinalitas muncul lebih merupakan hasil kebijakan politik negara-bangsa yang lahir dari kebangkrutan sistem politik kolonial tetapi langsung berada di mulut globalisasi ekonomi dunia. Di titik simpang itu, negara-negara post-kolonial yang berniat mengejar keteringgalan di bidang ekonomi tampaknya tidak punya pilihan lain selain mengikuti alur pembangunan yang memuaskan, yang didesain lembaga internasional yang berpusat dunia pertama. Di Asia Tenggara dan Asia Selatan, desain pembangunan seperti itu bukan hanya menciptakan “urbanisasi” seraya menumbuhkan kantong-kantong kumuh yang miskin di tepi-batas metropolitan (Ever & Koreff, 2002) dan kemiskinan daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan, ia juga menciptakan konflik antara pinggiran dan pusat yang makmur, dan antara pinggiran dan pinggirannya pinggiran yang sama-sama miskin.

“The most important class conflict in the poor countries of the world today is not between labour and and capital. Nor is it between foreign and national interests. It is bentwen the rural classes and the urban calsses. The rural sector contains most of the poferty, and most of the low-cost sources potential advence; but the urban sector contains most of the articulateness, organisation and power” (Lipoton, 1978:13).

Indonesia sekurangnya dua kali mengalami hal sama dengan yang digambarkan Lipton. Pertama di tahun 1950-an. Sejarah mencatatnya sebagai gerakan separatis. Terakhir terjadi di ujung masa Orde Baru yang dilakukan komunitas tempatan menuntut adat dan hukum adat di terapkan di kampung halamannya. Sayangnya, dua tuntutan dari daerah, sebagai pukulan balik terhadap pusat, tidak dilihat sebagai “benturan antara pusat-daerah”, tetapi dianggap perlawanan/separatisme kelompok/daerah kepada negara. Maka, pengalaman yang nyaris membuat Indonesia bubar ini tidak tertanggulangi baik. Bukan tidak mungkin, sentimen etnis

yang sempat muncul di akhir Orde Baru dan sempat memenangkan pertarungan politik di level nasional, jika tidak ditanggulangi secara komprehensif, ia mungkin akan menjadi kekuatan dengan daya ledak yang lebih dahsyat. Kekhawatiran seperti ini mungkin naif. Tetapi, pantas dicatat, sentimen etnis mulai lumrah terjadi segera setelah perang dingin berakhir (periksa, Nevola, 2001; Leoussi and Grosby, 2007; Jenkins, 2008; Smith, 2009;). Lepasnya Timor Timur dari Indonesia mesti dilihat dari kerangka ini.

Indonesia membutuhkan cara melihat masalah dengan cara dan pendekatan yang pernah digunakan menyelesaikan masalah kenegara-bangsaannya dalam kaitannya dengan “kekesalan-kekesan daerah”. Arti penting cara melihat masalah kenegara-bangsaannya dengan metode yang digunakan selama ini terkait dengan globalisasi yang diangkut revolusi teknologi informasi yang telah menyediakan sumber belajar yang sangat terbuka setiap suku-bangsa membandingkan dirinya dengan yang lain dengan cara, misalnya, melihat kemajuan negara-negara Balkan setelah lepas dari Uni Soviet, yang dicapai setelah suku-suku bangsa di sana melakukan perlawanan terhadap negara -- sebuah perlawanan yang dialasi sentiman *etno-nasionalism*. Di titik itu, tuntutan yang masih kencang diajukan agar daerah diberi ruang yang luas mengatur dirinya sendiri, di Maluku Utara bisa dibaca dalam Kasus Propinsi *Moloku Kie Raha*, dan sekarang Otonomi Khusus, Papua bahkan masih menuntut merdeka meski telah diberi otonomi yang luas, tampak merupakan hal wajar dan masuk akal.

Tentu saja saya tidak sedang membenarkan tindakan yang dianggap mengancam disintegrasi nasional. Barangkali benar – walaupun tidak seluruhnya tepat – bahwa tuntutan-tuntutan itu merupakan tanda memudarnya nasionalisme orang daerah. Yang ingin ditekankan di sini, nasionalisme dan integrasi nasional adalah dua hal berbeda – meski keduanya saling mengunci (*interlocking*). Nasionalisme berkaitan dengan perkara “perasaan manunia-manusia” yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, dan tempat tinggal dan nasib. Perasaan-perasaan seperti itu menjadi kekuatan pembentuk, juga memecah “integrasi nasional” dalam konteks negara-bangsa modern. Oleh karena itu, disintegrasi nasional yang dialami Indonesia kini harus ditanggulangi dengan mempertimbangkan banyak hal. Bentuk negara yang menentukan pola-pola perlakuan politik negara kepada daerah dan orang-orang di daerah adalah hal krusial yang mesti didiskusikan ulang.

Ini penting karena Indonesia belum bulat menyepakati definisi operasional konsep “negara kesatuan”. Apakah Negara “Kesatuan” Republik Indonesia (NKRI) merujuk pada makna “unitarian” – penyatuan dengan penyeragaman? Secara teoritik dan praktek konsep “kesatuan” yang diterapkan Indonesia diacu pada budaya politik Jawa yang mengenal kota sebagai “pusat” dan daerah sebagai “manca-manca” yang mendapat penerangan dari “kota-pusat”: satu konsep politik yang tidak dikenal di Indonesia Timur kini (Pelras, 2006). Karena itu, Indonesia harus berani mengajukan pertanyaan dan berani menjawab pertanyaan-pertanyaan: Apakah “kesatuan” berarti juga “federal” seperti yang dipikirkan Muhammad Hatta dan kalangan sosialis-religius dan Sultan Iskandar yang disebutkan di atas? Bukankah Bhineka Tunggal Ika adalah ajaran tentang semangat kemampuan bersatu meski berbeda – bukan “berbeda tetapi satu”? Mengapa setelah 72 tahun merdeka sistem negara hanya bisa, dan mungkin akan terus seperti itu, bekerja mengabdikan pada pembangun pusat di Jawa?

Pertanyaan-pertanyaan ini berkaitan dengan kenyataan bahwa keragaman suku-bangsa menggambarkan keragaman budaya politik, di mana masyarakat-masyarakat yang memiliki sistem budaya politiknya membutuhkan tindakan khusus secara kultural dan politis. Dengan kata lain, karena setiap suku-bangsa telah hidup dalam satu tatanan sosiokultural tertentu, dimana tatanan sosiokultural itu tidak hanya memberi arah tindak perilaku individual melainkan juga membangun dan menyediakan jaringan makna yang di situ setiap individu merekatkan diri dengan yang lain dalam satu jalinan sistem tata pergaulan, maka setiap masyarakat harus dilihat sebagai satu “masyarakat politik” yang diperlakukan menurut tata aturan yang mereka sepakati. Artinya, negara hadir hanya memberi payung terhadap keragaman budaya politik

dalam apa yang disebut “kesatuan teritorial”. Ini mestinya menjadi prasyarat utama “integrasi nasional” Indonesia. Sebab:

“National integration is a multidimensional, complex, and dynamic concept, involving a great variety of interlocking elements that operate separately to some extent but yet are also interacting, cumulative and generally mutually reinforcing. Indeed, integration is a holistic concept in which the totality of separated aspects is greater than the sum of the different parts. National integration incorporates a number of different dimensions.... First, common, integrative, historical experience obviously act as a cohesive force... Second, shared sociocultural attributes can help give a nation-state its identity, distinguish it from surrounding states, and enable its citizens to feel sense of unity... Third, interaction among the diverse peoples within a nation-state promotes integration, especially among those who share various sociocultural attributes... Fourth, regional economic interdependence and some measure of regional balance in economic development are fundamental to national integration<sup>6</sup> (Drake, 1989:2).

Langkah sederhana, tetapi penting, yang mungkin bisa dilakukan Indonesia adalah menjadikan birokrasi pemerintah pusat sebagai “wadah peleburan” (*melting pot*) bagi suku bangsa yang beragam. Seorang dosen di salah satu universitas di Ternate mengatakan:

“Mengapa program pembangunan yang dikirim pemerintah pusat tidak efektif meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memajukan pembangunan di daerah? Itu terjadi karena birokrasi pemerintah pusat diisi oleh satu suku bangsa yang dominan di negara ini. Suku-suku lain tidak tertampung dalam birokrasi pemerintah pusat. Menurut saya, birokrasi pemerintah pusat merupakan tempat yang strategis dalam dua arti. Pertama, dengan menampung pegawai yang berasal dari suku bangsa yang berbeda, birokrasi pemerintah pusat sudah melakukan integrasi nasional. Kedua, ini berkaitan dengan apa yang disebut dengan ‘percakapan antarbudaya’ dalam proses perencanaan pembangunan. Artinya, jika pejabat tinggi negara terdiri dari berbagai suku bangsa di Indonesia, maka mereka akan bisa saling bertukar gagasan dan pengetahuan tentang daerah. Dari situ, program pembangunan yang dirumuskan akan bersesuaian dengan kebutuhan daerah”.

---

<sup>6</sup>Integrasi nasional adalah konsep yang bersifat multidimensional, kompleks, dan dinamis, yang melibatkan berbagai elemen yang saling mengunci (*interlocking*) yang pada batas tertentu beroperasi secara terpisah-pisah namun juga saling berhubungan, kumulatif dan umumnya saling menguatkan. Jadi, integrasi adalah konsep holistik dimana totalitas aspek yang terpisah lebih besar daripada jumlah bagian yang berbeda. Integrasi nasional menggabungkan sejumlah dimensi yang berbeda-beda .... Pertama kasamaan dan pengamlaman sejarah jelas sebagai kekuatan kohesif tindakan bersama ... Kedua, simpati pada kesamaan sosiokultural dapat memberi identitas negara-bangsa, yang membedakannya dari negara-negara sekitarnya, dan memungkinkan warganya untuk merasakan rasa persatuan ... Ketiga, interaksi antara masyarakat yang beragam dengan negara-bangsa mempromosikan integrasi, terutama di antara mereka yang memiliki berbagai atribut sosiokultural ... Keempat, saling ketergantungan ekonomi antar wilayah dan beberapa ukuran keseimbangan wilayah dalam pembangunan ekonomi sangat penting bagi integrasi nasional (Drake, 1989: 2).

## Sumber Bacaan

- Abdullah, A.  
2010, *Maluku Utara dalam Kurun Niaga Nusantara: Suatu Kajian Sejarah Kemaritiman Indonesia Timur Abad ke-XVII-XIX*, diunduh dari: <http://azwarabdullah.blogspot.com/2010/06/maluku-utara-dalam-kurun-niaga.html>
- Anderson, B.  
2002, *Imagined Communities*, (terjemahan), INSIST – Yogyakarta.
- Andili, A.B.  
1980, “Profil Daerah Maluku Utara”, dalam, E.K.M. Masinambow, *Halmera dan Raja Ampat: Konsep dan Strategi Penelitian*, Lembaga Ekonomi dan Masyarakat Nasional (LEKNAS-LIPI), Jakarta, pp. 3-15.
- Bubandt, N.  
2014, “When Trauma Come to Halmahera – Global Governance, Emotion Work. And Reinvention of Spirit in North Maluku”, dalam Stodulka and Rottger-Rosler (eds), *Feelings at the Margins: Dealing with Violence, Stigma and Isolation in Indonesia*, Campus Verlag – Rankfurt-New York, pp. 81-102.
- Bertrand, J.  
2012, *Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia*, (terjemahan) Ombak-Yogyakarta.
- Burnet, I.  
2001, *Spice Islands: The Histori, Romance and Aventure of the Trade Over 2000 Years*, Rosenberg Publishing, Pty Ltd. – Australia.
- Cartesao, A. (ed)  
2015, *Suma Oriental: Karya Tome Pires – Perjalanan Dari Laut Merah ke Cina & Buku Francisco Rodrigues*, (terjemahan) Ombak – Yogyakarta.
- Castellas, M.  
2006, *The Rise of the Net Work: The Information Age, Economy, Society and Culture*, Blackwell Publishing, USA-UK-Australia.
- D’Andrea, C.  
2013, *Kopi, Adat dan Modal: Teritorialisasi dan Identitas Adat di Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi Tengah*, (terjemahan), Yayasan Tanah Air Beta, Jakarta, Sayogyo Institute, Bogor, dan Yayasan Tanah Merdeka, Palu-Timur, Sulawesi Tengah.
- Dhakidae, D.  
2002, “Memahami Rasa Kebangsaan dan Menyimak Bangsa Sebagai Komunitas-Komunitas Terbayang, Anderson, *Imagined Communities* (pengantar), INSIST – Yogyakarta.
- Djafaar, I.A.  
1999, *Sultan Ternate Iskandar Muhammad Djabir Sjah: Dari Moloku Kie Raha Hingga Negara Federal – Sebuah Bisografi Politik*, Tesis Magister Ilmu-Ilmu Humaniora, Program Studi Ilmu Sejarah, Universitas Indonesia.
- Drake, Ch.  
1989, *National Integration in Indonesia: Pattern and Policies*, University of Hawaii Press, Honolulu.

- Ever, H-D & Corff, R.  
2002, *Urbanisme di Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan dalam Ruang-Ruang Sosial*, Yayasan Obor Indonesia – Jakarta.
- Foucault, M.  
200, *Kegilaan dan Peradaban*, (terjemahan) Ikon Teralitera-Yogyakarta.  
2009, *Pengetahuan dan Metode Karya-Karya Penting Foucault* (terjemahan), Jalasutra-Yogyakarta.
- Halpern, D.  
2007, *Social Capital*, Polity Press, Cambridge-UK.
- Jenkins, R.  
2006, *Social Identity*, Routledge, London and New York.
- Jones, P.  
2009, *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*, (terjemahan), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Jones, T.  
2015, *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya Selama Abad Ke-20 Hingga Era Reformasi*, (terjemahan), Pustaka Yayasan Obor Indonesia dan KITLVI, Jakarta.
- Laksono, P.M.  
2009, *Peta Jalan Antropologi Indonesia Abad Keduapuluh Satu: Memahami Invisibilitas (Budaya) di Era Glonalisasi Kapital*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada – Yogyakarta, 29 Oktober.  
2011, *Ilmu Humaniora, Globalisasi, dan Representasi Identitas*, disampaikan pada Peringatan Dies Natalis ke-65, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada – Yogyakarta, 3 Maret.
- Legge, J. D.  
1993, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Syahrir*, (terjemahan), Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Leoussi, A.S. and Grosby, S. (eds).  
2007, *Nationalisme and Ethnosymbolism: History, Culture and Ethnicity in the Formation of Nations*, Edinburgh University Press, Manchester-UK
- Lipton, M.  
1978, *Why Poor People Stay Poor: Urban Bias in World Development*, Murice Tempel Smith, Ltd – London.
- Mann, R.  
2004, *400 Years and More: The British in Indonesia*, Gateway Book International, United Kingdom.
- Mansoben, J.R.  
1980, “Sistem Pemerintahan Tradisional di Salawati, Raja Ampat”, dalam Masinambow, E.K.M, ed, *Halmahera dan Raja Ampat; Konsep dan Strategi Penelitian*, LEKNAS-LIPI, Jakarta, h.151-168  
1995, *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya*, Lipi-Rul, Jakarta.
- Mr’azek, R.  
2006, *Enginner of Happy Land: Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di Sebuah Koloni*, (terjemahan) Yayasan Obor Indonesia – Jakarta.

- Nevola, G.  
2001, *Politics, Identity, Territory: The "Strength" and "Value" of Nation-State, Weakness of Regional Challenge*, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Quaderno 58.
- Nugroho, H.  
2006, "Mengkonsumsi Kehampaan di Era Global", dalam George Ritzer, *Mengkonsumsi Kehampaan di Era Globalisasi* (terjemahan), Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, h. xiii-xxx.
- Pamberton, J.  
2003, "*Jawa*", (terjemahan), Mata Bangsa – Yogyakarta
- Perlas, C.  
2006, *Manusia Bugis* (terjemahan), Nalar, Forum Jakarta-Paris, dan Ecole française d'Extreme-Orient, Jakarta.
- Ritzer, G.  
2006, *Mengkonsumsi Kehampaan di Era Globalisasi* (terjemahan), Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Rottger-Rossler, B. and Stodulka, T.  
2014 "Introduction – The Emotional Make-up of Marginality and Stigma", (dalam) Stodulka, T. and Rottger-Rossler, B. (eds), *Feelings at the Margins: Dealing With Violence, Stigma and Isolation in Indonesia*, Campus Verlag, Frankfurt-New York.
- Topatimasang, R. et.al. (ed)  
2004, *Orang-orang Kalah: Kisah Penyingkiran Masyarakat Adat Kepulauan Maluku*, INSIST – Yogyakarta.
- Topatimasang, R. (ed)  
2013, "Cengkeh: Dulu, Kini & Nanti, dalam, Putut EA, et.al. *Ekspedisi Cengkeh*, Penerbit Innawan dan Layar Nusa – Makassar.
- Turner, J.  
2011, *Sejarah Rempah: Dari Erotisme sampai Imprealisme*, (terjemahan) Komunitas Bambu – Depok-Indonesia.
- Smith, A.D.  
2009, *Ethno-Symbolism and Nationalism: A Culture Approach*, Routledge. London and New York.
- Satmpa, L.  
1992, *Spain and the Maluccas: Galleons Around the World*, Amper Ltd, and Ambassador of Spain.